Peran Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Maritim antar Negara

Vinna Herlista Winarty¹

¹1111230508@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRACT

Maritime disputes are one of the main challenges in interstate relations, especially in determining maritime boundaries and natural resource utilization. This article discusses the role of the International Court of Justice (ICJ) in resolving maritime disputes legally and peacefully. Through a descriptive-analytical method with a literature study approach, this article highlights the ICJ's contribution in developing international law of the sea, particularly through the application of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). The case study between Romania and Ukraine regarding a dispute in the Black Sea serves as a concrete example of how the ICJ can facilitate a fair and binding settlement. However, challenges in jurisdiction, enforcement of judgments, and political complexities mean that the effectiveness of the ICJ still depends heavily on the consent and commitment of disputing states. These findings emphasize the importance of strengthening international legal mechanisms and multilateral diplomacy in resolving maritime disputes in a sustainable manner.

Keywords : International Court of Justice, maritime disputes, UNCLOS, law of the sea, Black Sea, international jurisdiction.

ABSTRAK

Sengketa maritim merupakan salah satu tantangan utama dalam hubungan antarnegara, khususnya dalam penentuan batas wilayah laut dan pemanfaatan sumber daya alam. Artikel ini membahas peran Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dalam menyelesaikan sengketa maritim secara hukum dan damai. Melalui metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi pustaka, artikel ini menyoroti kontribusi ICJ dalam mengembangkan hukum laut internasional, terutama melalui penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Studi kasus antara Rumania dan Ukraina mengenai sengketa di Laut Hitam menjadi contoh konkret bagaimana ICJ dapat memfasilitasi penyelesaian yang adil dan mengikat. Meskipun demikian, tantangan dalam yurisdiksi, pelaksanaan putusan, serta kompleksitas politik menunjukkan bahwa efektivitas ICJ masih sangat bergantung pada persetujuan dan komitmen negara-negara yang bersengketa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme hukum internasional dan diplomasi multilateral dalam menyelesaikan sengketa maritim secara berkelanjutan.

Kata kunci : Mahkamah Internasional, sengketa maritim, UNCLOS, hukum laut, Laut Hitam, yurisdiksi internasional.

Pendahuluan

Sengketa maritim antarnegara menjadi salah satu isu yang cukup sering muncul dalam hubungan internasional. Masalah ini umumnya berkaitan dengan batas wilayah laut, hak eksplorasi sumber daya alam di laut, serta klaim yurisdiksi atas perairan tertentu. Di era globalisasi seperti sekarang, ketika kebutuhan akan sumber daya alam terus meningkat, wilayah laut semakin memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, geopolitik, maupun aspek lingkungan. Oleh karena itu, konflik maritim tak hanya menyangkut kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi juga bisa memengaruhi stabilitas kawasan dan hubungan internasional secara lebih luas.

Dalam kondisi seperti ini, kehadiran mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum, bersifat netral, dan adil menjadi sangat krusial. Tanpa adanya acuan hukum yang jelas dan disepakati bersama, potensi munculnya konflik terbuka atau bahkan ketegangan militer bisa semakin besar. Di sinilah peran lembaga peradilan internasional menjadi sangat penting, yaitu sebagai penengah yang dapat menyelesaikan sengketa secara damai, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui oleh komunitas global.

Salah satu lembaga yang memiliki peran vital dalam hal ini adalah Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), yang merupakan badan peradilan utama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan kewenangan yang didasarkan pada Piagam PBB dan Statuta Mahkamah, ICJ menjadi forum utama bagi negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan maritim secara hukum dan damai.

Peran Mahkamah Internasional tidak terbatas pada menyelesaikan kasus-kasus sengketa semata. Lembaga ini juga berkontribusi dalam memperjelas dan mengembangkan aturan-aturan hukum laut internasional, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Melalui berbagai putusan yang telah dihasilkan, Mahkamah memberikan arah dan landasan hukum yang dapat dijadikan acuan oleh negara-negara dalam menghadapi persoalan maritim.

Yurisdiksi Mahkamah Internasional bersifat sukarela—artinya hanya dapat berlaku jika negara-negara yang bersengketa menyetujuinya. Namun justru karena sifat sukarela inilah, mekanisme ini mencerminkan komitmen negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berdasarkan hukum. Dengan cara ini, Mahkamah Internasional turut menjaga stabilitas kawasan, mendukung kepastian hukum, dan memperkuat penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam kerangka hukum internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis. Informasi yang di peroleh melalui studi pustaka dengan sumber primer dan sekunder termasuk perundang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi terkait.

Hasil Pembahasan

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) merupakan hasil kesepakatan yang dilakukan oleh negara – negara PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) untuk mengatur pengelolaan dan penggunaan wilayah laut di dunia.

Konvensi ini menetapkan aturan untuk industri, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, serta mendefinisikan hak dan kewajiban negara-negara terkait penggunaan lautan dunia. Perjanjian internasional tahun 1958 tentang laut digantikan oleh konvensi ini, yang ditandatangani pada tahun 1982. Satu tahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang menandatangani UNCLOS, perjanjian tersebut mulai berlaku pada tahun 1994. Uni Eropa adalah salah satu dari 158 negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut hingga saat ini.¹

UNCLOS menjadi landasan hukum utama dalam menyelesaikan sengketa maritime antar negara, seperti mengatur terkait penetapan batas laut territorial sejauh 12 mil, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil, serta mengatur landasan kontinen.

Laut Territorial terletak di sepanjang garis pantai dari garis dasar dan dikelilingi oleh batas luar laut territorial, laut territorial merupakan perairan nasional yang berbentuk jalur laut..² Pada saat UNCLOS 1982 ditetapkan barulah dirumuskan secara pasti lebar laut territorial, dimana setiap hak negara berhak menetapkan lebar laut territorial yang tidak melebihi 12 mil.³ Jangkauan kedaulatan negara di laut telah

¹ Yulia Wiliawati, Danial, Fakhul Muin, “Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2 (2022), hlm 288

² Belardo Prasetya Mega Jaya dkk, *Hukum Laut Internasional : suatu pengantar dan sejarah perkembangannya* (Depok:PT RajaGrafindo Persada), hlm 73.

³ *Ibid*, hlm 74

meningkat sebagai akibat dari perluasan kedaulatan negara di perairan teritorial dari 3, 4, dan 6 mil menjadi maksimum 12 mil.⁴

ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) merupakan salah satu fitur paling revolusioner dari UNCLOS 1982 dan Memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut. Penjelajahan, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi sumber daya alam hidup dan tidak hidup dari dasar laut dan lapisan bawahnya, serta air di atasnya dan kegiatan terkait lainnya, semuanya diizinkan oleh rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bagi negara-negara pesisir.⁵

Menurut UNCLOS 1982, landas kontinen terdiri dari dasar laut dan tanah di bawahnya hingga 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, atau hingga pinggirannya luar tepi kontinen jika pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.⁶

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memiliki Statuta Mahkamah Internasional yang mengatur terkait keberadaan, kewenangan, dan prosedur Mahkamah Internasional/ICJ sebagai peradilan utama sengketa internasional. Yang bisa menjadi pihak dalam kasus yang disengketakan hanyalah Negara anggota PBB dan negara lain yang telah menjadi pihak pada Statuta Mahkamah Internasional atau yang telah menerima yurisdiksinya berdasarkan kondisi tertentu.⁷ Pasal 36 Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa yurisdiksi ICJ bersifat pada berdasarkan pada persetujuan negara.⁸

Contoh Kasus

⁴ *Ibid*, hlm 75

⁵ *Ibid*, hlm 81

⁶ *Ibid*, hlm 90

⁷ International Court of Justice, "How the Court Works," diakses 6 Juni 2025, <https://www.icj-cij.org/how-the-court-works>.

⁸ Statuta Mahkamah Internasional, Pasal 36

Pada tanggal 2 Juni 1997, Rumania dan Ukraina menandatangani perjanjian bilateral tentang hubungan kontrak dan kerja sama lintas batas antara negara-negara tetangga (yaitu, perjanjian yang hanya ditandatangani oleh dua negara).⁹

Sebuah kesepakatan telah dicapai antara kedua belah pihak tentang perbatasan maritim Laut Hitam. Rumania dan negara-negara di perbatasan landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif juga telah setuju untuk bekerja sama. Kasus ini gagal mencapai kesepakatan selama bertahun-tahun. Rumania akhirnya mengajukan kasus kontroversial ke Mahkamah Internasional (ICJ) setelah merasa kasus tersebut tidak terselesaikan hingga akhirnya mengajukan sengketa kepada Ukraina untuk menyelesaikan sengketa perbatasan Laut Hitam. Namun, penting untuk diingat bahwa Rumania telah mengeluarkan peringatan kepada Ukraina jika kasus tersebut dibawa ke Mahkamah Internasional.

Rumania menggugat Ukraina di Mahkamah Internasional (ICJ) pada 16 September 2004 dalam sengketa batas laut antara kedua negara Laut Hitam. Rumania menggugat Ukraina karena ketidaksepakatan tentang "pembentukan batas laut tunggal antara dua negara di Laut Hitam, yang dipisahkan oleh landas kontinen dan zona ekonomi khusus di dekatnya."¹⁰

Rumania menetapkan yurisdiksi Mahkamah Internasional berdasarkan Pasal 4 (h). Pasal 4 (h) dari Lampiran Anggaran Dasar menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara pihak, kasus tersebut akan dibawa ke Mahkamah Internasional atas permintaan salah satu pihak. Dan jika tidak ada kesepakatan, dia akan diberi tenggat waktu yang wajar dalam waktu dua tahun sejak awal negosiasi antara kedua belah pihak.¹¹

⁹ Arif Hidayatullah, "Penyelesaian Sengketa Delimitasi Laut di Laut Hitam antara Rumania dan Ukraina," ResearchGate, Januari 2022, diakses 6 Juni 2025, https://www.researchgate.net/publication/357619698_Penyelesaian_Sengketa_Delimitasi_laut_Dilat_Hitam_Antara_Rumania_dan_Ukrania.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

Pada 3 Februari 2009, ICJ mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa batas laut antara Rumania dan Ukraina di Laut Hitam. Dalam kasus demarkasi di Laut Hitam ini, negara bagian, Rumania sebagai penggugat, dan Ukraina sebagai tergugat. Dalam kasus ini, perselisihan diselesaikan dengan one-line break untuk menentukan batas antara ZEE dan landas kontinen.

Keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada proses pemisahan batas laut antara Rumania dan Ukraina. Ini termasuk pantai yang terkait, area yang terkait, konstruksi yang berjarak sama, faktor pengaruh yang terkait, dan uji ketidakseimbangan. Dalam keputusan tersebut, diputuskan bahwa ada dua keputusan pantai yang relevan terkait dengan pembagian ZEE dan landas kontinen.¹² Diputuskan adil dan final. Pengadilan dari Dua Negara menguasai Laut Hitam, membaginya sesuai dengan batas Negara masing-masing

Tantangan

Meskipun Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa maritim antarnegara, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang membatasi efektivitasnya dalam praktik.

1. ICJ menghadapi batasan yurisdiksi yang cukup jelas. Suatu perkara hanya dapat ditangani oleh mahkamah apabila kedua negara yang bersengketa secara tegas setuju tentang yurisdiksinya. Dengan kata lain, ICJ secara otomatis tidak memiliki otoritas untuk menyelesaikan setiap jenis sengketa maritim. Seringkali, negara-negara yang bersengketa menolak untuk menyerahkan otoritas pengadilan internasional, sehingga ruang gerak Mahkamah menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa di ICJ sangat bergantung pada kemauan politik negara-negara yang bersangkutan.
2. Meskipun putusan ICJ bersifat final dan mengikat, ada masalah pada tahap pelaksanaannya. Tidak ada cara untuk memaksa negara untuk mematuhi

¹² *Ibid*

keputusan tersebut. Pelaksanaan keputusan Mahkamah sangat bergantung pada niat baik setiap negara dan komitmen mereka untuk menghormati hukum internasional. Ketika sebuah negara memilih untuk mengabaikan keputusan ICJ, tidak ada instrumen hukum internasional yang dapat menjatuhkan sanksi secara langsung. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah melalui diplomatik atau forum internasional lainnya seperti Dewan Keamanan PBB, yang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik global.

3. Salah satu kendala unik dalam penyelesaian sengketa maritim adalah kompleksitas geopolitik. Jenis sengketa ini biasanya melibatkan masalah strategis seperti penguasaan atas sumber daya alam, klaim sejarah atas wilayah, dan masalah keamanan nasional. Hal ini menyebabkan penyelesaian hukum sering tergeser oleh kepentingan politis dan nasionalisme maritim yang kuat di setiap negara. Seringkali, dalam keadaan seperti ini, pendekatan yuridis tidak cukup untuk menangani seluruh dinamika sengketa, terutama jika penyelesaiannya tidak sesuai dengan tujuan politik nasional suatu negara.

Penutup

Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) memegang peranan strategis dalam penyelesaian sengketa maritim antarnegara, khususnya dalam konteks hubungan internasional yang diwarnai oleh kepentingan nasional, perebutan sumber daya alam, serta batas yurisdiksi wilayah laut. Keberadaan ICJ sebagai lembaga peradilan utama di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa memungkinkan negara-negara menyelesaikan konflik maritim secara damai, adil, dan berdasarkan hukum yang berlaku secara internasional. Mahkamah ini tidak hanya memberikan putusan dalam kasus tertentu, tetapi juga berperan dalam pengembangan dan penafsiran hukum laut internasional melalui prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.

Dalam kasus antara Rumania dan Ukraina mengenai batas wilayah maritim di Laut Hitam, ICJ menunjukkan bagaimana proses penyelesaian yang legal dan

sistematis dapat mengatasi kebuntuan diplomatik yang berlangsung selama bertahun-tahun. Putusan Mahkamah yang didasarkan pada pertimbangan hukum, keadilan, serta prinsip-prinsip delimitasi wilayah menunjukkan bahwa pendekatan yuridis dapat memberikan hasil yang konkret dan final, asalkan semua pihak menghormati dan mematuhi proses yang telah disepakati. Kasus ini menjadi contoh penting bagaimana ICJ dapat menyelesaikan konflik secara efektif dan menciptakan preseden yang bermanfaat dalam tata kelola wilayah laut internasional.

Namun demikian, terdapat berbagai tantangan signifikan yang membatasi efektivitas Mahkamah Internasional. Pertama, yurisdiksi ICJ bersifat sukarela dan hanya berlaku jika negara-negara yang bersengketa sepakat untuk tunduk pada kewenangannya. Banyak negara menolak membawa sengketa ke Mahkamah karena pertimbangan politik atau kekhawatiran atas hasil yang merugikan. Kedua, meskipun putusan ICJ bersifat final dan mengikat secara hukum, tidak terdapat mekanisme penegakan yang efektif untuk memaksa negara melaksanakan putusan tersebut. Pelaksanaan keputusan sangat bergantung pada niat baik (*good faith*) negara yang bersangkutan dan tekanan diplomatik dari komunitas internasional.

Selain itu, penyelesaian sengketa maritim seringkali melibatkan isu-isu strategis seperti klaim historis, keamanan nasional, dan kendala geopolitik. Faktor-faktor ini menjadikan penyelesaian hukum tidak selalu memadai, karena banyak negara yang lebih mengedepankan pendekatan politis atau militer dalam mempertahankan klaim mereka. Oleh karena itu, meskipun ICJ memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitasnya dalam praktik sangat bergantung pada komitmen politik dan kesediaan negara-negara untuk menempatkan hukum di atas kepentingan sepihak.

Daftar Pustaka

- Hidayatullah, A. (2022, January). Penyelesaian sengketa delimitasi laut di Laut Hitam antara Rumania dan Ukraina. ResearchGate. Retrieved June 6, 2025, from https://www.researchgate.net/publication/357619698_Penyelesaian_Sengketa_Delimitasi_laut_Dilaut_Hitam_Antara_Rumania_dan_Ukrania
- International Court of Justice. (n.d.). How the court works. Retrieved June 6, 2025, from <https://www.icj-cij.org/how-the-court-works>
- Jaya, B. P. M., dkk. (n.d.). Hukum laut internasional: Suatu pengantar dan sejarah perkembangannya. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Statuta Mahkamah Internasional. (n.d.). Pasal 36.
- Wiliawati, Y., Danial, D., & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam upaya penegakan hukum laut internasional di perairan negara pantai. Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(2), 286-298.